

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp10,0 T (702,2%)
▼ -33,2% (yoy)

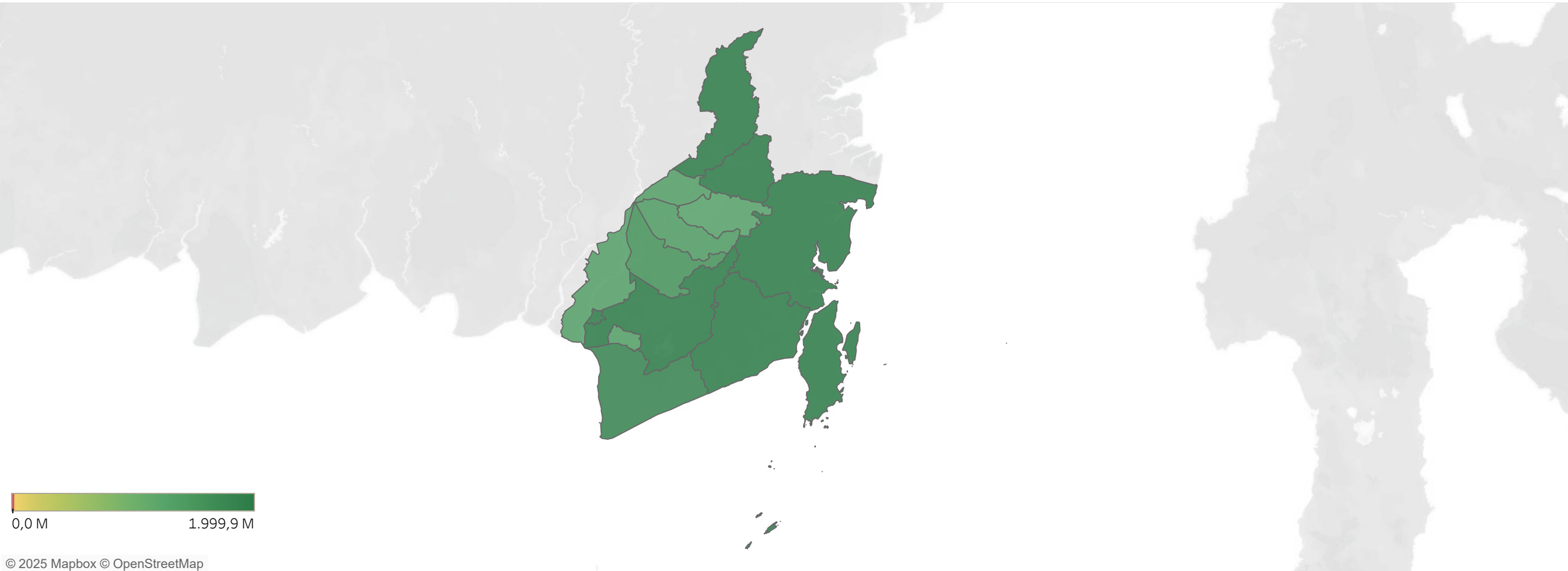
Belanja

Rp30,9 T (75,3%)
▲ 6,7% (yoy)

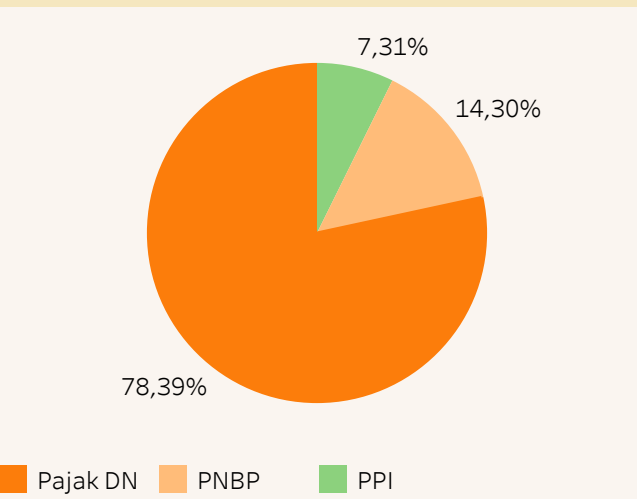
Defisit

Rp-20,9 T (52,7%)
▲ 49,8% (yoy)

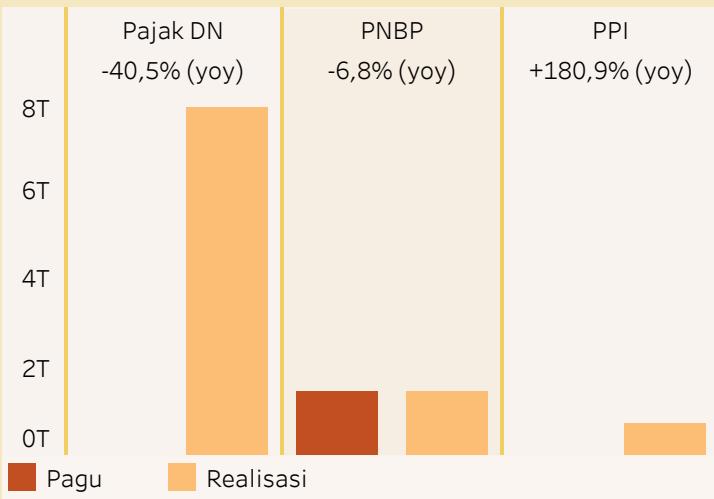
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



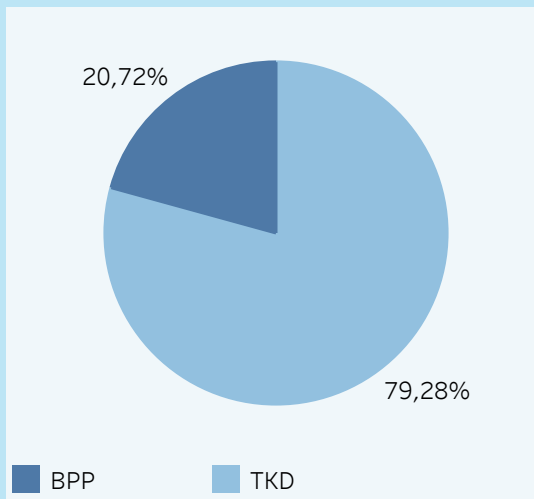
Persentase Komposisi Pendapatan



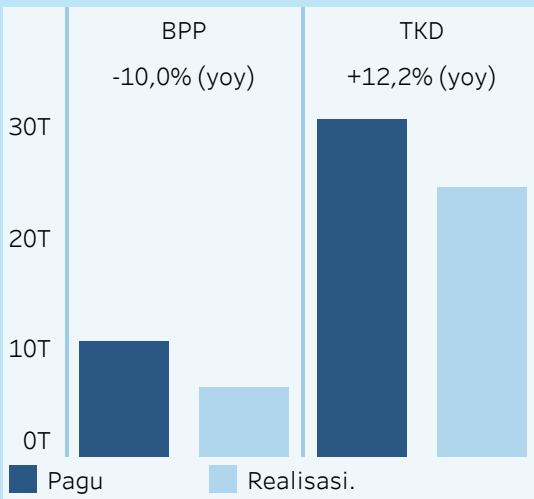
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



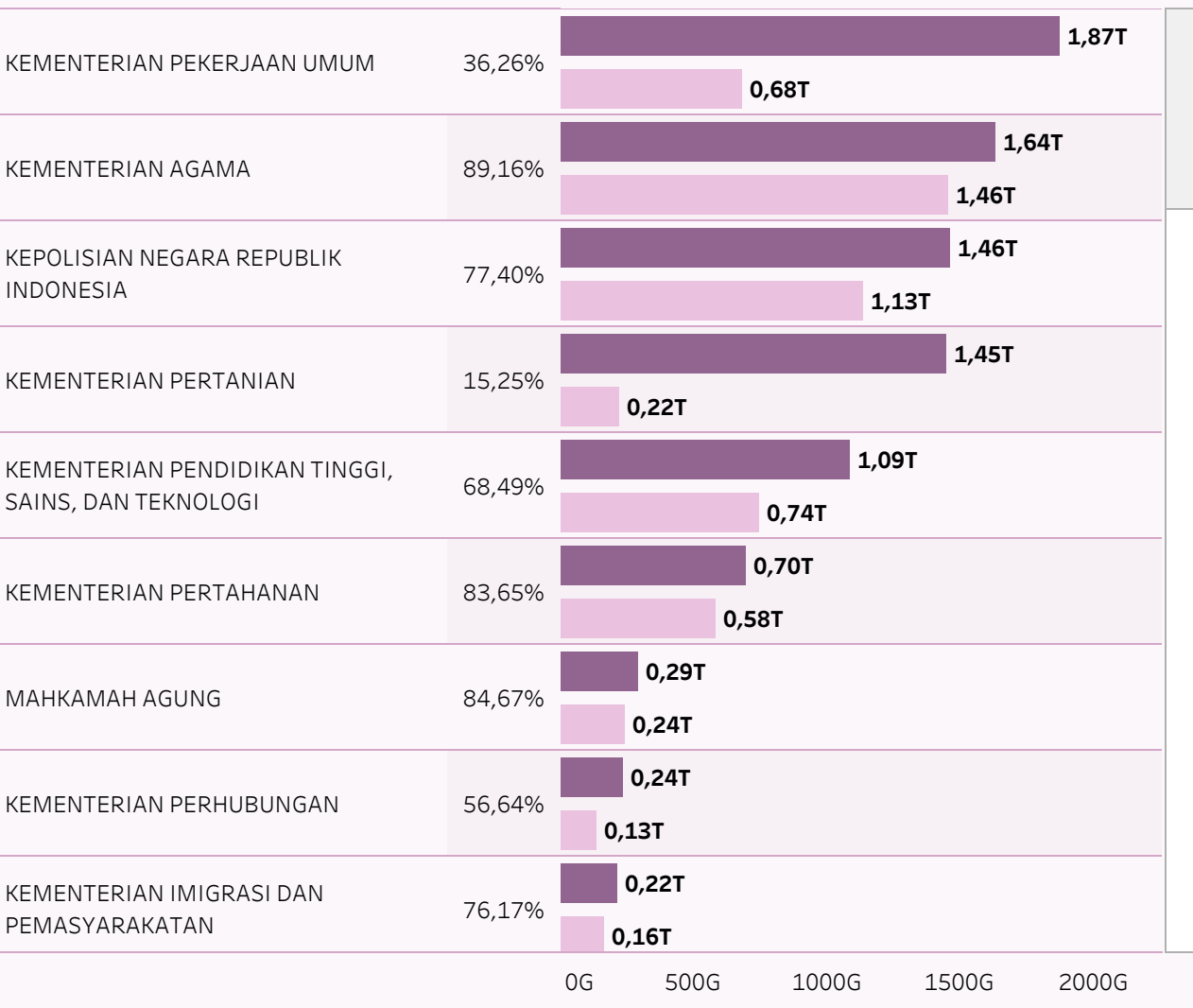
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	15,0T	10,0 T	▼ 33,24%
Grand Total	15,0T	10,0 T	▼ 33,24%

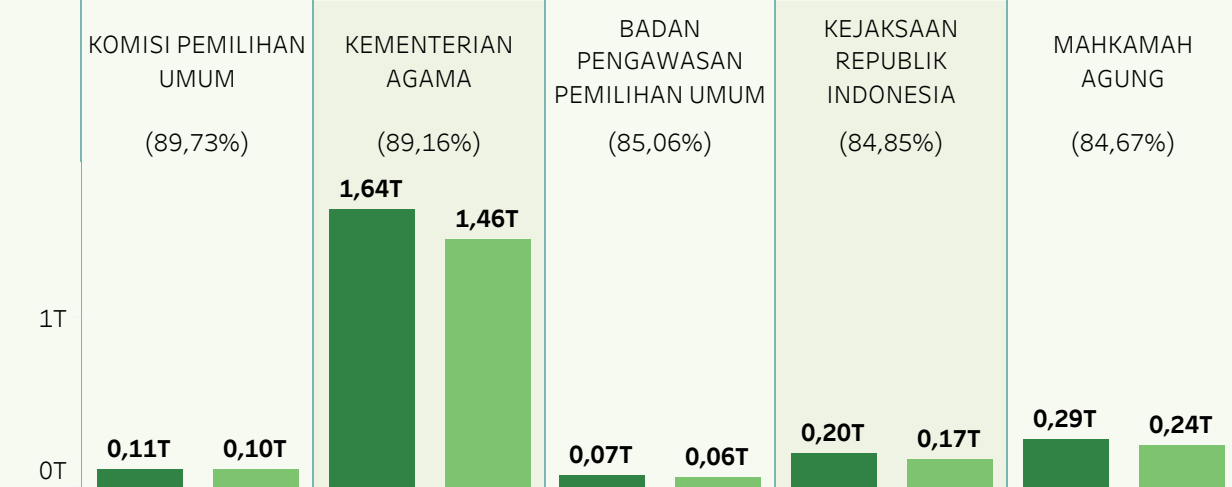
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	29,0T	69,6%	41,1T	30,9 T	75,3%	▲ 6,72%
Grand Total	41,7T	29,0T	69,6%	41,1T	30,9 T	75,3%	▲ 6,72%

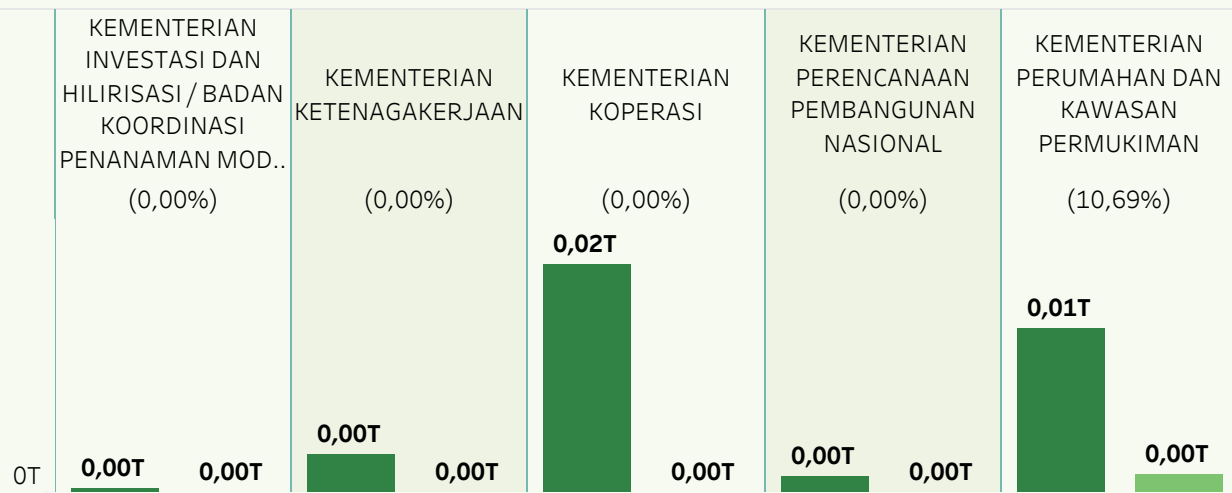
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



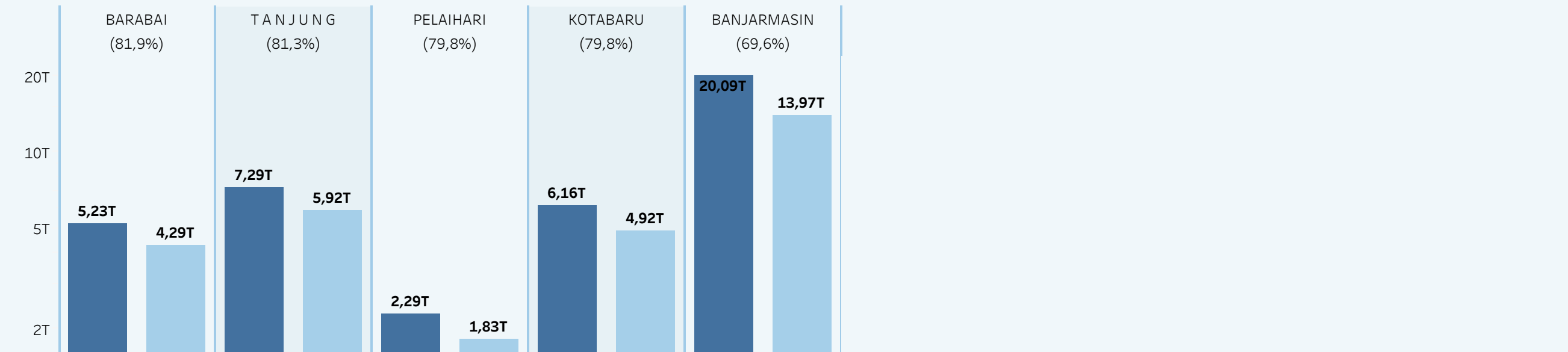
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



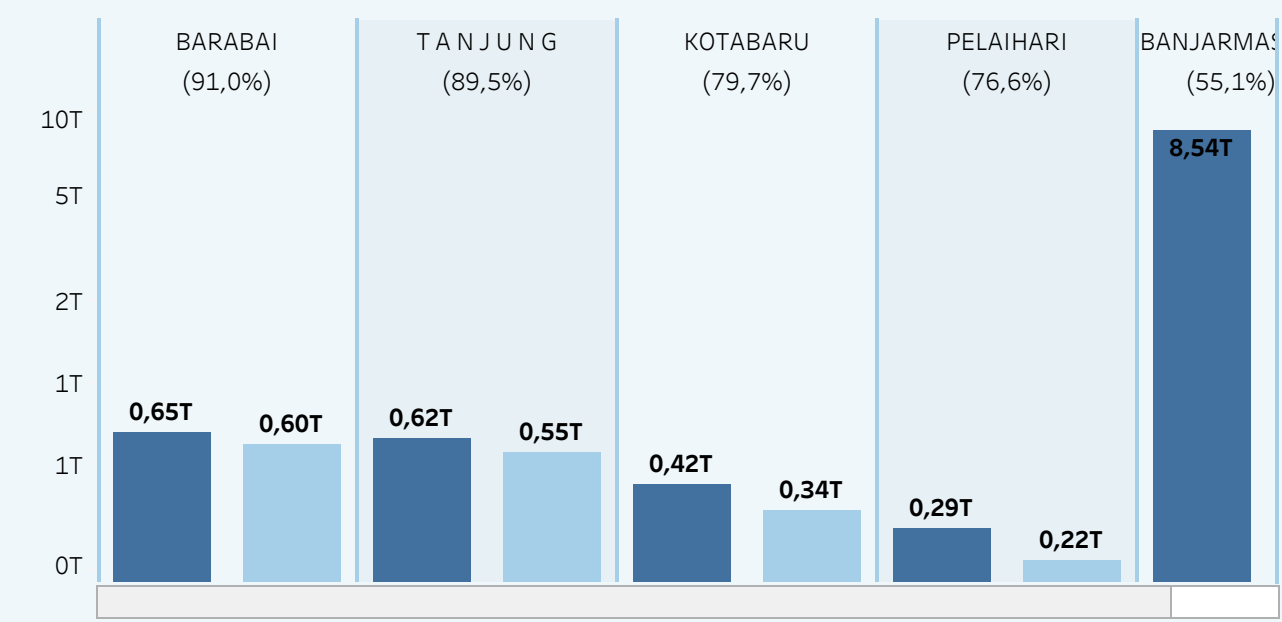
5 KL Persentase Realisasi Terendah



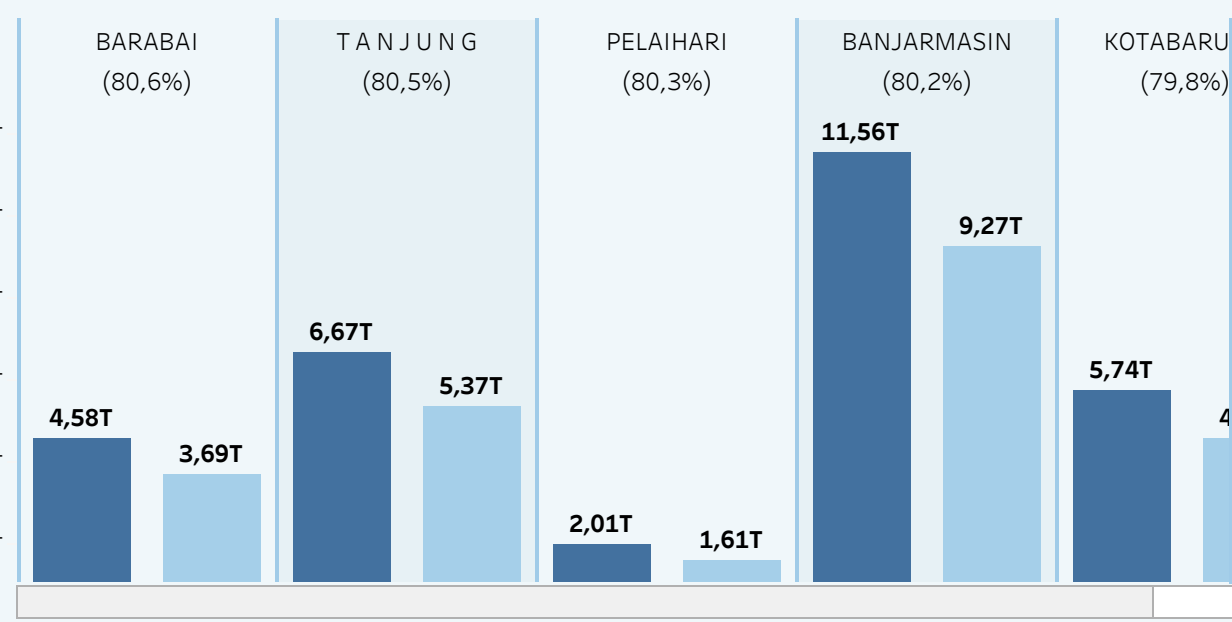
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 24 Oktober 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp10,04 triliun (45,55% dari target), terkontraksi 33,24% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 38,66% (Rp 7,87 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 282,46% (Rp 733,74 miliar), PNPB mencapai 100,81% (Rp1,44 triliun) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,05 triliun. Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (78,39%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 24 Oktober 2025

1. **Kinerja Belanja Negara sebesar Rp30,93 triliun (75,3%) dari pagu Rp41,07, tumbuh 6,7% yoy.** Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 60,9% (Rp6,41 triliun) dari pagu Rp10,52 triliun, terkontraksi 10,0% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 80,3% (Rp24,52 triliun) dari pagu Rp30,55 triliun, tumbuh 12,2% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (79,28%).
2. **Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi,** Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp1,87 triliun, dengan realisasi mencapai 36,26% (Rp0,68 triliun). Kementerian Agama menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 89,16% dari pagu Rp1,64 triliun (Rp1,46 triliun). Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 15,25% dari pagu Rp1,45 triliun (Rp0,22 triliun).
3. **Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah,** kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum dengan realisasi 89,73% dari pagu Rp0,11 triliun (Rp0,10 triliun). Sementara, kinerja penyerapan terendah dialami oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi 10,69% dari pagu Rp11,32 miliar (Rp1,21 miliar). Dan untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM realisasinya masih 0%.
4. **Kinerja KPPN,** Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 81,9% dari pagu Rp5,23 triliun (Rp4,29 triliun). Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 69,6% dari pagu Rp20,09 triliun (Rp13,97 triliun).

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Sampai dengan bulan September 2025, secara pertumbuhan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Kalsel per sektor utama mayoritas mengalami kontraksi kecuali Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Aktivitas Keuangan dan Asuransi; serta Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, yang mengalami pertumbuhan positif. Selain restitusi, penyebab penurunan dari beberapa sektor tersebut dikarenakan adanya tren negatif harga dan produksi batubara.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

DJP agar melakukan diversifikasi basis penerimaan pajak dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor nonbatubara seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta aktivitas keuangan dan asuransi yang masih menunjukkan kinerja positif. Perlu dilakukan penguatan pengawasan dan kepatuhan pajak melalui pemanfaatan data terintegrasi lintas instansi dan pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran guna menjaga stabilitas penerimaan dan mendorong transformasi ekonomi daerah menuju struktur yang lebih berkelanjutan dan tahan terhadap fluktuasi harga komoditas

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Masih ditemukan penggunaan akun 521219 yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, dimana akun 521219 dimaksud seharusnya dipergunakan untuk belanja biaya-biaya Crash Program/Belanja Darurat, Belanja pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker, dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar melakukan penelaahan dan verifikasi lebih mendalam terhadap usulan rincian belanja pada saat pembahasan RKA-K/L, guna memastikan penggunaan akun sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
2. DJA agar memperkuat mekanisme pengendalian dan validasi sistem pada aplikasi KRISNA/SMART agar secara otomatis dapat memberikan peringatan (warning) ketika terdapat penggunaan akun 521219 yang tidak sesuai dengan ketentuan peruntukannya.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat kenaikan unit dibangun tahun 2025 dari sebelumnya 16.188 unit menjadi 16.509 unit, jumlah lokasi tahun 2025 dari sebelumnya 150 lokasi menjadi 154 lokasi, jumlah penerima tahun 2025 dari sebelumnya 8.225 menjadi 8.385

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M

Progres Fase I

Jumlah Desa dan Kelurahan yang Sudah Membentuk Koperasi Merah Putih dan Jumlah Koperasi Desa dan Kelurahan yang Sudah Berbadan Hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013

Progres Fase II

2. Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Akun Simkopdes (Microsite) sebanyak 2.013 sudah maksimal seperti periode sebelumnya
3. Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Gerai (Minimal 1 Gerai) semula 133 menjadi 250.
4. Jumlah Keseluruhan Gerai Koperasi yang Sudah Aktif semula 167 menjadi 307.
5. Jumlah Koperasi Melakukan Permohonan Proposal Bisnis semula 38 menjadi 59.
6. Jumlah Permohonan Proposal Bisnis semula 146 menjadi 216.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR

E | SMA Unggul Garuda, Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua, oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah Se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

F | Revitalisasi Sekolah, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. pelaksanaan revitalisasi untuk Jumlah target sekolah yang direvitalisasi adalah 61 Sekolah yang terdiri dari 43 madrasah dan 18 sekolah di daerah transmigrasi

Progres target 43 madrasah adalah 38 madrasah dalam tahap pembangunan, dan 5 masih dalam tahap lelang pekerjaan.

Progres target 18 sekolah adalah 12 sekolah dalam tahap pembangunan, dan 6 masih dalam tahap

rejang pekerjaan

G | Ketahanan Pangan, terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp379,55 M (28,87%) menjadi Rp538,69M (28,98%) dan juga terdapat kenaikan alokasi Pagu Anggaran semula Rp1.314,84 M menjadi Rp1.858,52 M.

H | Ketahanan Energi, Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

Banyak masyarakat belum memahami skema pembiayaan rumah bersubsidi/FLPP, sehingga minat untuk mendaftar masih rendah, terutama di daerah luar kota besar.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi publik terkait kebijakan FLPP mengenai manfaat, persyaratan, dan mekanisme pengajuan rumah bersubsidi dan diharapkan dapat memudahkan masyarakat memahami program tersebut, melalui pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, bank penyalur, dan komunitas lokal, termasuk penyuluhan langsung di desa, kampanye digital sederhana, serta layanan konsultasi keliling.

C | Isu Giant Sea Wall, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

D | Rekomendasi Giant Sea Wall, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Beberapa koperasi mengaku kesulitan mencari anggota bila lini bisnisnya bukan simpan pinjam. Sementara penambahan anggota koperasi sangat diperlukan guna menambah modal koperasi. Untuk opsi penambahan modal dari perbankan, sampai dengan saat ini masih banyak yang menunggu.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Perlu dilakukan strategi diversifikasi dan promosi nilai tambah keanggotaan yang jelas bagi calon anggota, misalnya dengan program pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan usaha, atau layanan kolektif yang relevan dengan kebutuhan komunitas. pemerintah dan dinas terkait dapat memfasilitasi kemitraan koperasi dengan perbankan atau lembaga keuangan formal agar opsi penambahan modal melalui pinjaman atau kredit bergulir dapat segera direalisasikan.

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

1. SR yang berlokasi di BLK Provinsi Kalsel belum memiliki ruang klinik, ruang perpustakaan, asrama siswa dan guru yang memadai serta ruang guru yang sangat sempit
2. Kamar asrama masih bercampur antara siswa SMA dengan siswa SD sehingga akan menimbulkan permasalahan sosial sendiri karena perbedaan umur yang terlampau jauh

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Pemerintah Daerah selaku pengelola SR Rintisan perlu segera melakukan langkah-langkah koordinatif antar unit instansi Daerah untuk mendukung pemenuhan standar sarana dan prasarana pelaksanaan SR Rintisan sesuai standar Kemensos RI

I | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

J | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikontribusikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

K | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

1. Kapasitas pengelolaan satuan pendidikan belum merata;
2. Akuntabilitas penggunaan dana masih berisiko;
3. Koordinasi lintas level pusat-daerah belum optimal;
4. Pemeliharaan pasca revitalisasi belum terencana.

L | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

1. Laksanakan bimtek dan pendampingan teknis P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan);
2. Gunakan sistem pelaporan dan monitoring digital dan tingkatkan audit berbasis risiko dan transparansi publik;
3. Bentuk tim koordinasi revitalisasi berjenjang dan tetapkan SOP komunikasi dan evaluasi berkala lintas instansi;
4. Wajibkan rencana pemeliharaan 3–5 tahun; libatkan masyarakat dan Pemda dalam perawatan berkelanjutan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan luasnya lahan di Kalimantan Selatan, mekanisasi pertanian jadi solusi yang tidak bisa ditunda. Kehadiran alsintan diharapkan mampu mempercepat pengolahan lahan, menghemat tenaga, serta meningkatkan efisiensi produksi.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Perlu penguatan kelembagaan petani agar pengelolaan lahan hasil cetak sawah bisa lebih efisien. Melalui wadah seperti UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan), Gapoktan, dan Brigade Pangan, para petani didorong untuk mengelola alsintan secara kolektif, memastikan alat dapat digunakan sepanjang kelompok dan musim.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi mini-grid atau skema off-taker lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

Progres Peluang Investasi Daerah s.d. 30 September 2025

1. Progres peluang investasi daerah s.d. 30 September menunjukkan 4 peluang investasi, sama dengan bulan sebelumnya, dengan perkiraan total nilai investasi sebesar Rp5,72 triliun, tidak berubah dari pemetaan bulan sebelumnya. Dari 18 sektor lapangan usaha, peluang investasi tersebut tersebar di 3 lapangan usaha, didominasi oleh Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sejumlah 2 peluang investasi (50% dari total peluang investasi) dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp202,07 miliar (3,53% dari total perkiraan nilai investasi).
2. Laporan APID terkait Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru telah disampaikan ke Dit. SMI pada tahun sebelumnya namun belum ada tindak lanjut dari Dit. SMI. Tiga peluang investasi lainnya belum ada update tindak lanjut.

No Sektor	Peluang Investasi	Perkiraan Nilai Investasi (satuan Rp)
1 Industri Pengolahan	Smelter Slab Billet Steel Kab. Tanah Bumbu	5.520.000.000.000
2 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	SPAM Regional Banua Enam Bendungan Tapin	197.772.720.000
3 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru	4.294.967.295
4 Transportasi dan Pergudangan	Pergudangan, Pusat Distribusi Banjarmasin	300.000.000
Total		5.722.322.687.295

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Kinerja Program MBG (s.d. 24 Oktober 2025) menunjukkan terdapat kenaikan jumlah SPPG sebelumnya dari 122 menjadi 134, jumlah supplier sebelumnya 92 menjadi 96, dan penerima manfaat sebelumnya 357.789 menjadi 359.142.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Banyak daerah pedesaan seperti daerah di pegunungan Meratus, dan pesisir, belum memiliki dapur atau fasilitas penyimpanan makanan yang layak. Hal ini menyulitkan pelaksanaan penyediaan dan distribusi makanan bergizi setiap hari.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

BGN berkoordinasi dengan pemda serta instansi terkait untuk mengembangkan konsep model dapur satelit dan atau dapur keliling guna menjangkau wilayah dengan akses sulit.